



FAKTOR PENGHAMBAT BERKEMBANGNYA BISNIS DARI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Lusianus Heronimus Sinyo Kelen^{1*}, Stevvileny Angu Bima²

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba^{1,2}

Jln. R. Soeprapto No. 35, Prailiu, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia 87111

sinyokelen@unkriswina.ac.id 1*

*corresponding author

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v8i2.19990>

Informasi Artikel		Abstract
Tanggal masuk	25 April 2023	<p>Research objective: This research aims to determine the inhibiting factors for the business development of BUM Desa in East Sumba Regency, East Nusa Tenggara Province.</p> <p>Research method: The research method used was grounded theory and employed a qualitative approach to bring a phenomenon into theory. The study was conducted by collecting data from enumerators who were Unkriswina Sumba students. The collected data comprised 64 informants from 19 BUM Desa spread over 14 sub-districts in East Sumba Regency.</p> <p>Results: There are six factors causing obstacles to the business of BUM Desa in East Sumba Regency from developing, namely: 1) Low readiness of Human Resources (HR) in managing BUM Desa businesses, 2) low public awareness to support the running of BUM Desa, 3) management or financial management that is still lacking, 4) low planning analysis before starting a business, 5) poor oversight and coordination functions from the village government to BUM Desa administrators, and 6) lack of BUM Desa infrastructure.</p> <p>The novelty of research: a research approach based on a grounded theory approach to identify the factors causing the BUM Desa activities not to work based on the root of the problem and the phenomenon, then from this phenomenon, a theory is formed, which is also known as "mini theory".</p> <p>Keywords: Village, BUM Desa, business, management and development.</p>
Tanggal revisi	2 Juli 2023	
Tanggal diterima	3 Oktober 2023	

Abstrak

Tujuan penelitian: Riset ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat berkembangnya bisnis dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode penelitian: Metode penelitian yang digunakan yaitu *grounded theory*. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk membawa suatu fenomena ke dalam teori. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data oleh enumerator yang merupakan mahasiswa Unkriswina Sumba. Data yang terkumpul adalah sebanyak 64 informan dari 19 BUM Desa yang tersebar pada 14 Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur.

Hasil: Terdapat 6 faktor yang menyebabkan terhambatnya bisnis dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur untuk berkembang, yaitu: 1) Rendahnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola usaha BUM Desa, 2) Kesadaran masyarakat yang rendah untuk mendukung berjalannya BUM Desa, 3) Pengelolaan atau manajemen keuangan yang masih kurang, 4) Rendahnya analisis perencanaan sebelum usaha dijalankan, 5) Rendahnya fungsi pengawasan dan koordinasi dari pemerintah desa kepada pengurus BUM Desa, dan 6) Minimnya infrastruktur BUM Desa.

Kebaruan penelitian: pendekatan penelitian yang didasari oleh pendekatan *grounded theory*, untuk mengidentifikasi faktor penyebab tidak berjalannya aktivitas BUM Desa berdasarkan akar masalahnya beserta fenomena, kemudian dari fenomena tersebut dibentuk teori yang disebut juga sebagai "teori mini".

Kata Kunci: Desa, BUM Desa, bisnis, manajemen, dan perkembangan.



Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari tiga besar provinsi termiskin di Indonesia. Tentu kehadiran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUM Desa) melalui berbagai bisnis dan usaha yang dijalankan dapat mempercepat perkembangan ekonomi di desa serta diharapkan dapat menunjang pembangunan di desa [1]. Data nasional dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa BUM Desa mengalami peningkatan jumlah dari 64,85 persen pada 2019 menjadi 71,07 persen pada tahun 2020. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri menyumbang peningkatan sebesar 3,58 persen [2]. Namun dibalik peningkatan yang signifikan tersebut, tidak berarti BUM Desa berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

Sampai tahun 2019, jumlah BUM Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 900 BUM Desa dari 3.026 desa. 700 diantaranya aktif sedangkan sisanya berjumlah 123 BUM Desa mengalami kondisi “mati suri” [3]. Berdasarkan data tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar, seperti: kenapa 123 BUM Desa tidak aktif? Apa yang menyebabkan BUM Desa tersebut tidak aktif? Kabupaten Sumba Timur, merupakan salah satu dari tiga kabupaten yang diproyeksikan untuk pengembangan BUM Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur [4]. Namun hal tersebut menjadi sumber permasalahan dimana data menunjukkan bahwa masih banyak BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur tidak berjalan dan berkinerja dengan baik. Data perkembangan BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan berjalan di tempat [5]. Hal ini ditunjukkan dengan data dimana 66,43 persen BUM Desa tidak aktif atau stagnan dari 140 BUM Desa yang terdaftar pada data base Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur [6]. Gambaran ini jelas mencerminkan terdapat sejumlah masalah pada BUM Desa.

Kehadiran BUM Desa tentunya harus memberikan dampak signifikan bagi pembangunan desa, sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [7]. Namun melihat fenomena yang terjadi tentang permasalahan pada BUM Desa menunjukkan sebuah permasalahan yang perlu ditinjau kembali untuk melihat apa sebenarnya menyebabkan usaha-usaha yang dibentuk BUM Desa tidak berjalan dengan baik. Pada sisi lain, telah banyak riset yang telah dilakukan untuk menemukan akar dari permasalahan tidak berkembangnya BUM Desa, namun pendekatan penelitian yang diberikan belum mampu mengungkap akar masalah yang sebenarnya. Penelitian ini memberikan sebuah jawaban dengan pendekatan kualitatif dari informan di lapangan. Keterbatasan jumlah informan yang diwawancarai terkait mencari tahu penyebab berkembangnya usaha dari BUM Desa juga ditemui pada beberapa penelitian [8] [9].

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat berkembangnya bisnis dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, penelitian ini juga memberikan manfaat penelitian secara praktis, dimana BUM Desa mendapatkan sebuah masukan untuk perbaikan kinerja yang lebih baik di masa depan. Selain itu juga penelitian ini memberikan bantuan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, lebih tepat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Terakhir, penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi (perguruan tinggi) dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan pada pengurus BUM Desa. Penelitian terdahulu terkait faktor penghambat BUM Desa sebagai dasar teori, dijelaskan sebagai berikut: faktor yang



menghambat berjalannya usaha BUM Desa umumnya didominasi faktor internal (artinya faktor yang dapat dikendalikan oleh BUM Desa itu sendiri) yaitu manajemen dan sumber daya manusia sebagai pengelola BUM Desa masih terbatas [10]. Selain itu juga terdapat faktor lain yang menyebabkan usaha/bisnis yang dikelola BUM Desa mengalami kegagalan, yaitu: komunikasi antara pemerintah desa dan pengurus serta pengelola BUM Desa [8].

Metode

Penelitian ini melakukan pendekatan secara kualitatif dengan mengumpulkan data kualitatif pada informan yang erat kaitannya dengan BUM Desa [11]. Informan dipilih merupakan melalui sejumlah langkah-langkah, sebagai berikut: a) Dari 140 BUM Desa, 93 terkategori tidak aktif dan stagnan. B) 20 persen dari 93 BUM Desa dipilih sehingga terdapat 19 BUM Desa. C) Informan yang diwawancarai adalah pengurus desa, pengurus BUM Desa dan masyarakat desa. Tiga informan ini dipilih untuk memperoleh data yang kemudian diolah menjadi informasi secara menyeluruh dan memberikan sebuah gambar dari perspektif yang berbeda-beda.

Pengumpulan data primer dilakukan oleh enumerator dari mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistik inferensial. Sebelum enumerator mengumpulkan di lapangan, penulis memberikan sosialisasi panduan pertanyaan yang diberikan kepada informan. Data dikumpulkan selama 3 minggu yaitu 4 sampai 22 April 2022. Secara total informan yang terkumpul adalah sebanyak 64 orang / informan, yang tersebar pada 19 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur.

Penelitian kualitatif sekarang dapat ditemukan pada banyak bidang, termasuk dalam disiplin ilmu bisnis, manajemen dan penelitian organisasi, yang secara tradisional, umumnya dilihat berdasarkan objektivitas, 'fakta', angka dan kuantifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *grounded theory*. Pendekatan ini bertujuan untuk membawa suatu fenomena ke dalam teori [12]. *Grounded theory* adalah metode penelitian kualitatif yang berupaya mengembangkan teori yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis [13]. Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan semua fenomena empirik terkait permasalahan BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah fenomena empirik terkumpul peneliti membuat sebuah bagan untuk memberikan kesimpulan sementara, yang kemudian perlu diuji lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Informan yang diwawancarai sebanyak 64 orang dari 19 BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur. Secara pertanyaan yang dibangun terbagi atas tiga kategori, pertanyaan awal seputar profil dan pendirian awal dari BUM Desa, kemudian pertanyaan kedua yang diberikan seputar perjalanan BUM Desa serta persepsi masyarakat, pemerintah desa maupun pengurus BUM Desa terkait faktor yang menghambat aktivitas bisnis BUM Desa. Bagian terakhir yaitu pertanyaan seputar saran dan masukan perbaikan BUM Desa di masa yang akan datang.

Profil BUM Desa Sumba Timur

Penelitian dilakukan pada 19 lokasi BUM Desa yang tersebar di Kabupaten Sumba Timur. Terdapat 3 pihak yang diwawancarai yaitu masyarakat desa, pemerintah desa dan

pengurus BUM Desa. Berikut tabel yang menjelaskan tentang 19 BUM Desa yang menjadi objek penelitian. Secara sebaran, dari 19 BUM Desa (desa) dengan jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan, dimana Kabupaten Sumba Timur sendiri memiliki 22 Kecamatan [14]. Kondisi ini menunjukkan 66,63 persen keterjangkauan wilayah penelitian.



Gambar 1. Peta Sebaran Lokasi Penelitian

Sumber : Google Map

Kondisi ini tentunya merepresentasikan permasalahan atau faktor yang menyebabkan BUM Desa tidak berkembang, terutama dari sisi aktivitas bisnis BUM Desa. Beberapa BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur didirikan sejak 2015, namun paling banyak berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa maupun pengurus BUM Desa, bahwa BUM Desa didirikan pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2018 sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 [15]. Secara umum, semua BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur dibentuk melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat, namun terdapat satu temuan menarik sewaktu mewawancarai informan dari masyarakat desa. Hasilnya menunjukkan BUM Desa tidak dibentuk berdasarkan musyawarah, hal ini juga menunjukkan rendahnya sosialisasi pemerintah desa maupun pengurus BUM Desa kepada masyarakat [9]. Kondisi ini memberikan kesan bahwa kehadiran BUM Desa bukan untuk mensejahterakan masyarakat, namun sebagai formalitas yang dibentuk oleh pemerintah desa.

Tabel 1. Profil BUM Desa

Nama BUM Desa	Desa, Kecamatan	Jumlah Informan
Kawahamu	Hambapraing, Kanatang	4
Sinar Kasih	Mbatakapidu, Kota Waingapu	4
Harapan Baru	Pambotanjara, Kota Waingapu	3
Ori Angu	Wunga, Haharu	4
Kadahang	Kadahang, Haharu	3
Sinar Lai Hawu	Lai Hawu, Lewa Tidahu	2
Luri Mambir	Pulu Panjang, Nggaha Ori Angu	4
Bina Diri	Tana Tuku, Nggaha Ori Angu	2
Tarimbang	Tarimbang, Tabundung	3
Usaha Sejahtera	Kambatatana, Pandawai	3



Luri Tapa Opu	Wanga, Umalulu	1
Ori Angu	Tanaraing, Rindi	4
Praiyawang	Rindi, Rindi	4
Matawai Mirip	Tamma, Pahunga Lodu	4
Wulla Berkarya	Wulla, Wulla Waijelu	4
Hadakamali	Hadakamali, Wulla Waijelu	4
Luri Pandulang	Kotak Kawau, Kahaungu Eti	4
Kiritana	Kiritana, Kambera	4
Luku Wingir Jaya	Luku Wingir, Kambata Mapambuhang	3
Jumlah		64

Sumber: Data diolah, 2023.

Faktor Penghambat Berkembangnya Bisnis BUM Desa

Dari jawaban informan terkait faktor penghambat berjalannya aktivitas bisnis pada BUM Desa 10 informan tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan atau jawabannya keluar dari konteks pertanyaan yang diberikan. Sehingga hanya 54 jawaban informan yang dapat diolah, dianalisis, kemudian dibahas. Dari hasil pemetaan jawaban informan terdapat enam (6) faktor yang dinilai oleh informan menjadi faktor penghambat aktivitas bisnis dari mandeknya sebuah BUM Desa.

Faktor yang pertama dan paling sering dijawab oleh informan, yang menghambat berjalannya aktivitas bisnis dari BUM Desa yaitu rendahnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola usaha BUM Desa [16]. Terdapat satu kekurangan ketika BUM Desa didirikan, yaitu kurangnya pembekalan dan pendampingan terhadap pengurus BUM Desa. Hal ini tentunya bisa memberikan dampak pada kesiapan pengurus dalam mengelola unit bisnis [17]. Pemerintah desa percaya secara penuh bahwa pengurus BUM Desa dapat mengorganisir dan menjalankan BUM Desa dengan baik, walaupun fakta menunjukkan hal yang bertolak belakang. Berikut beberapa jawaban informan mengenai rendahnya kesiapan SDM.

“...dari pengurus BUM Desa sendiri. Kalau pengurusnya benar-benar bertanggung jawab, tidak akan mengalami kendala. Kalau mau sukses, jangan berikan ruang untuk masyarakat bon, karena faktor dari segi rasa, dan lain lain, sehingga masyarakat dikasih saja kebebasan. Giliran sekarang mau tagih susah, karena buku-bukunya tidak beres, dan tidak dicatat, yang akhirnya hilang lenyap uang...” (wawancara dengan masyarakat desa).

“ya memang kelihatannya, kembali pada sumber daya... memang, walaupun pendidikannya lumayan, tapi mungkin dia punya *basic*, dia diberikan pendidikan agak lama juga, dia menyesuaikan kegiatan ini. Andaikan dia dalam bentuk sarjana begitu, apalagi kalo pengurusnya masih pendidikan SLTP, SLTA, sulit juga untuk bagaimana mengembangkan suatu usaha...” (wawancara dengan masyarakat di desa).

“Namanya manusia kita punya kelemahan kemungkinan besar dari pengurus, cara penyusunan administrasinya kurang jelas, sehingga BUM Desa ini mandek, mungkin dari pengelolaannya yang kurang beres, mungkin sehingga uangnya, modalnya, tidak tahu arah kemana” (wawancara dengan pejabat desa).



Faktor kedua yang menurut para informan menjadi faktor penghambat berkembangnya bisnis atau usaha dari BUM Desa adalah kesadaran masyarakat yang rendah untuk mendukung berjalannya BUM Desa. Kondisi ini umumnya disebabkan masalah komunikasi yang masih kurang. Masyarakat sebagai konsumen perlu mendapatkan informasi sehingga masyarakat bisa menjadi tahu, kemudian dapat mendukung eksistensi atau keberadaan BUM Desa itu sendiri [18]. Sehingga penting untuk BUM Desa maupun pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang keberadaan, program, maupun aktivitas BUM Desa. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga membuat masyarakat bisa sadar serta peduli dengan keberadaan BUM Desa [16]. Berikut kutipan langsung wawancara dengan informan.

“... dan juga masyarakat sendiri yang tidak ada saling membantu, ketika BUM Desa sudah memberikan bon atau keringanan ketika mereka belum punya uang, tetapi mereka tidak bertanggung jawab untuk membayar. Sehingga utang yang dari awal 2017 belum dibayar sampai saat ini” (wawancara dengan pengurus BUM Desa).

“...yang sebenarnya hasil-hasil dari masyarakat yang harus BUMDes terima, tapi kan masyarakat tidak mau mendukung... hasilnya tidak diberikan kepada BUMDes begitu, mau menjual langsung, jadi akhirnya kitapun... pengurus tidak bisa memaksakan masyarakat harus ke kami... Jadi kita jalankan sesuai, supaya jangan macet begitu, kita jalankan macam sementara sekarang yang dijalankan ini...” (wawancara dengan pengurus BUM Desa).

“...akhirnya banyak barang-barang milik BUMdes yang diutangkan di masyarakat begitu, jadi mau bagaimana lagi karena memang mau membantu masyarakat jadi banyak sekali pupuk yang kami kasih bon-bon di masyarakat, ada yang bilang nanti kami bayar dalam tenggat waktu tertentu, ada yang bilang biar kami tukar dengan padi begitu itu kendala...” (wawancara dengan pengurus BUM Desa).

Faktor ketiga ini yang menghambat jalannya bisnis pada BUM Desa, umumnya juga terjadi pada berbagai jenis bisnis. Faktor tersebut yaitu pengelolaan atau manajemen keuangan yang masih kurang. Faktor ketiga ini juga memiliki keterkaitan dengan faktor pertama, yaitu rendahnya kualitas SDM. Kurangnya pelatihan maupun pendampingan terhadap pengurus BUM Desa oleh pemerintah maupun perguruan tinggi menyebabkan pengelolaan unit-unit bisnis pada BUM Desa menjadi macet dan tidak berjalan.

Faktor ketiga ini menjadi faktor yang krusial, disebabkan tujuan BUM Desa didirikan adalah meningkatkan pendapatan asli desa [19], sehingga kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan akan membawa kerugian, yang akhirnya tidak dapat meningkatkan pendapatan asli desa tersebut. Berikut hasil atau kutipan wawancara dari informan.

“...pengurus-pengurus belum bisa memahami tugas dan tanggung jawab mereka baik dalam pengolahan keuangan, dan mereka itu tidak pernah dilatih, tidak pernah ada pembekalan tugas, mereka ditetapkan begitu-begitu saja. Mungkin pengelolaan keuangan tidak mudah, padahal sebenarnya pertama itu maju, usahanya pemasukannya sudah bagus, dan setelah itu lama kemudian langsung macet” (wawancara dengan kepala desa).



“Kendalanya awal itu, tahun 2018, karena kebetulan saya perangkat desa juga, awal dibentuk ketika modal diberikan BUMdes ini belum pelatihan jadi ketika awal-awal kendalanya itu manajemen keuangannya tidak bagus, kurang rapi begitu, jadi kendalanya sudah bisa diselesaikan, setelah setengah tahun berjalan, sudah ada pelatihan pengurus” (wawancara dengan kepala desa).

Faktor keempat yang menyebabkan terhambatnya aktivitas bisnis atau usaha dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur adalah rendahnya analisis perencanaan sebelum usaha dijalankan. Perencanaan merupakan faktor penting dalam manajemen atau pengelolaan suatu organisasi seperti BUM Desa. Ketika tidak menerapkan perencanaan, maka berjalannya suatu organisasi pasti akan terhambat dan sulit mengendalikannya.

Perencanaan dapat dilakukan melalui studi kelayakan bisnis / usaha. Hal ini biasanya dianggap mahal dan pemborosan, apalagi studi kelayakan bisnis dilakukan pada saat usaha belum ada. Namun sebenarnya analisis kelayakan itu merupakan tahapan perencanaan yang baik, sebelum memutuskan suatu usaha dijalankan atau tidak [20]. Berikut hasil wawancara dengan para informan.

“...usaha bumdes tidak berjalan dengan lancar, karena di sini usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa. Kami sebagai masyarakat merasa tersaingi, karena usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa juga penjualan sembako sementara juga kami di desa... banyak kios-kios, itu memicu usaha Badan usaha milik Desa menjadi macet” (wawancara dengan masyarakat desa).

“...menurut pengamatan saya... kenapa bumdes tidak berjalan sampai saat ini, karena usaha yang dilakukan atau kegiatan yang dijalankan... bertabrakan dengan kegiatan ketua bumdes, karena ketua bumdes juga mempunyai kegiatan yang sama, jual beli kain dari masyarakat dijual ke pasar, jadi dia lebih mementingkan usaha pribadi, ketimbang usaha bumdes begitu, jadi sampai saat ini BUMDES nya tidak berjalan” (wawancara dengan kepala desa).

Faktor kelima dan keenam ini tidak terlalu banyak dijelaskan oleh informan yang dapat menghambat aktivitas BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur. Faktor tersebut yaitu: Rendahnya fungsi pengawasan dan koordinasi dari pemerintah desa kepada pengurus BUM Desa dan minimnya infrastruktur BUM Desa.

Sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa, BUM Desa memiliki kewajiban untuk diawasi dan dipantau oleh pemerintah desa, bahkan oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten [17]. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi penyelewengan atau pekerjaan yang dilakukan di luar tanggung jawab dari BUM Desa. Lemahnya fungsi kontrol, dapat menjadi celah bagi pengurus BUM Desa untuk melakukan aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, minimnya infrastruktur, menjadi faktor yang menghambat jalannya kegiatan bisnis BUM Desa. Misalkan, BUM Desa tidak memiliki Gedung atau bangunan sendiri, sehingga aktivitas bisnis dilakukan di rumah pengurus BUM Desa. Kondisi

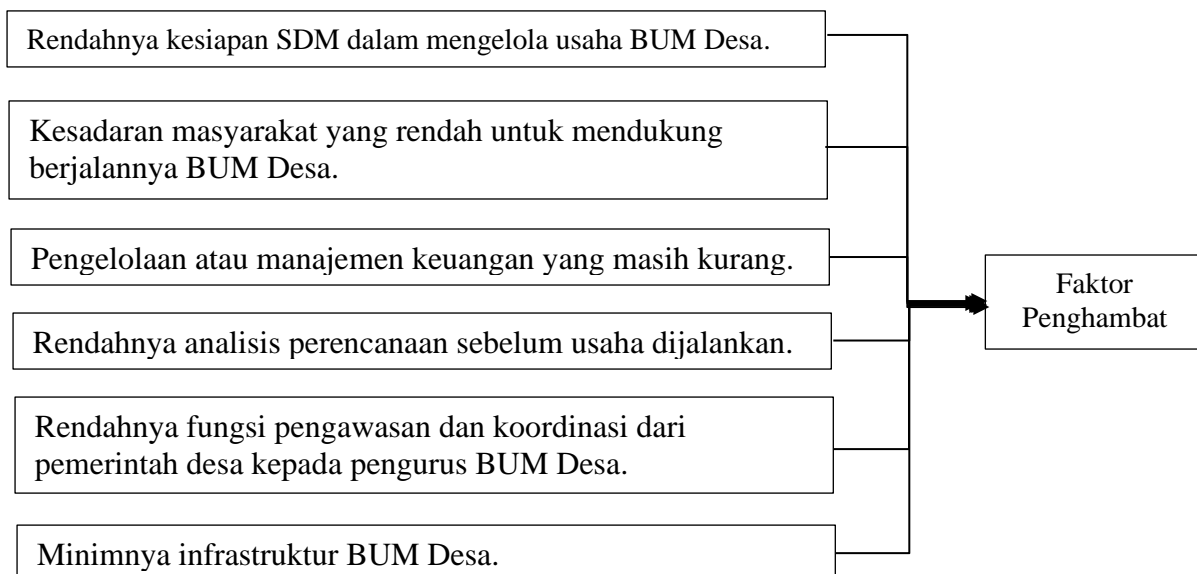
ini sebenarnya bisa memicu *conflict of interest*, karena urusan pengelolaan BUM Desa akan tercampur dengan pengelolaan rumah tangga dari pengurus tersebut. Berikut hasil wawancara dari informan.

“...dan memang selama berjalannya bumdes ini bahwa kurang terlibatnya pemerintah desa. Artinya pemerintah desa kurang mengawasi jalannya bumdes selama ini, dan itu yang menjadi kendala sehingga sampai dengan saat ini bumdes ini mengalami.. ada sedikit kekurangan” (wawancara dengan kepala desa).

“Bumdes itu mandek karena terutama gedungnya belum ada, dan belum dibangun, kemungkinan besar itu sementara dalam proses” (wawancara dengan masyarakat desa).

“kurangnya fasilitas transportasi (kendaraan bumdes)... sehingga mengakibatkan kurangnya kegiatan yang dilakukan masyarakat...” (wawancara dengan masyarakat desa).

Secara ringkas temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa ada enam faktor penghambat berkembangnya bisnis dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur yaitu: 1) Rendahnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola usaha BUM Desa, 2) Kesadaran masyarakat yang rendah untuk mendukung berjalannya BUM Desa, 3) Pengelolaan atau manajemen keuangan yang masih kurang, 4) Rendahnya analisis perencanaan sebelum usaha dijalankan, 5) Rendahnya fungsi pengawasan dan koordinasi dari pemerintah desa kepada pengurus BUM Desa, dan 6) Minimnya infrastruktur BUM Desa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, penelitian ini memberikan sebuah kerangka yang dijadikan sebagai “teori mini” dari riset ini [21].



Gambar 2. Teori Mini Penelitian



Sumber : Data diolah, 2023

Hasil penelitian atau teori mini yang dihasilkan tersebut (sesuai Gambar 2), dapat diuji kembali dengan pendekatan kuantitatif, untuk melihat seberapa kuat dan signifikan faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan bisnis dari BUM Desa. Teori mini yang dimaksud adalah bagan hasil penelitian yang menyimpulkan faktor-faktor penghambat berkembangnya bisnis/usaha yang dijalankan BUM Desa.

Ketika dianalisis lebih mendalam faktor manajemen BUM Desa menjadi faktor dominan dalam perkembangan maupun penghambat bisnis dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur [17]. Hal tersebut terbukti dengan kurangnya perencanaan dan pengendalian, yang merupakan dua fungsi terpenting dalam manajemen. Selain itu manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci, jika sebuah BUM Desa ingin maju dan berkembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa faktor penghambat dari berkembangnya aktivitas bisnis pada BUM Desa yaitu faktor pengelolaan atau manajemen, seperti kurangnya finansial dan SDM, serta kurangnya sosialisasi BUM Desa tersebut kepada masyarakat [9]. Selain itu juga hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa selain minimnya kemampuan mengelola BUM Desa oleh pengurus, mereka juga menemukan bahwa minimnya kesadaran masyarakat mendukung BUM Desa, misalnya dalam konteks pengembalian piutang usaha [22].

Enam faktor penghambat BUM Desa yang berhasil diidentifikasi, mendukung teori sebelumnya [8]. Pada penelitian terdahulu juga memiliki permasalahan seputar, rendahnya kesiapan SDM [10]. Kesadaran masyarakat yang masih minim, pengelolaan keuangan yang masih kurang profesional [22]. Kurangnya pengawasan maupun koordinasi antara pengurus BUM Desa dengan pemerintah desa [23]. Namun ada dua hal yang dapat menjadi tambahan teori penghambat berkembangnya bisnis dari BUM Desa, yaitu: analisis perencanaan yang masih kurang, serta minimnya infrastruktur BUM Desa.

BUM Desa umumnya dibentuk tanpa sebuah perencanaan atau juga melalui studi kelayakan bisnis [24]. Sehingga wajar ketika diimplementasikan, maka BUM Desa akan terhambat perkembangannya. Minimnya infrastruktur BUM Desa juga menjadi faktor penghambat, dimana pengurus BUM Desa umumnya mencampur antara aset milik BUM Desa dan aset pribadinya. Tidak hanya, BUM Desa juga memiliki keterbatasan pada gedung / ruangan tempatnya beraktivitas.

Masukkan Guna Perkembangan BUM Desa ke Depannya

Dari jawaban informan terkait saran atau masukkan untuk perkembangan BUM Desa di masa yang akan datang, 11 informan tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan atau jawabannya keluar dari konteks pertanyaan yang diberikan. Sehingga hanya 53 jawaban informan yang dapat diolah, dianalisis, kemudian dibahas. Terdapat 7 saran yang diberikan oleh informan untuk memperbaiki kinerja usaha atau bisnis dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur. Saran pertama yaitu, melakukan reorganisasi



pengurus BUM Desa. Langkah ini dipandang perlu dan sangat penting disebabkan munculnya orang-orang baru dengan ide yang juga baru, dapat memperbaiki BUM Desa ke depannya. Namun hal ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diikuti oleh langkah-langkah strategis.

“...kalau bumdes dia berjalan kita perlu musyawarah kembali, kita harus reorganisasi sudah itu pengurus bumdes yang lama, jadi kita angkat pengurus BUMDES yang baru” (wawancara dengan pejabat desa).

“hal yang disampaikan yang disampaikan pertama adalah reorganisasi pengurus sehingga dengan adanya reorganisasi pengurus bumdes dan keterlibatan pengurus baru nanti yang jelas punya visi dan misi tersendiri untuk perlu semangat tersendiri untuk bangun ini bumdes begitu” (wawancara dengan pejabat desa).

Saran kedua yang paling sering dijawab oleh informan yaitu, melakukan analisis perencanaan dan potensi desa. Hal ini dilakukan guna memetakan potensi di desa, dan memilih usaha yang cocok dengan karakteristik wilayah dan masyarakat desa tentunya.

“...memang sekarang ini bumdes sementara kita mau buka sayap, unit usaha begitu, kan selama ini unit usahanya di bidang pertanian saja, tergantung modal, modal masih terbatas sehingga membuka unit usaha baru di bidang kelautan (perikanan), rencananya mau begitu, karena memang potensi di Wulla ini selain pertanian, ada rumput laut. Mau buka usaha simpan pinjam juga, jadi dari uang bumdes nanti, kita bantu masyarakat untuk modal usahanya dia, usaha untuk traktor, beli pupuk, obat-obatan. Sehingga masyarakat itu tidak larinya ke koperasi harian, yang ini hari kita pinjam besoknya lagi kita kasih kembali” (wawancara dengan kepala desa).

Saran ketiga yang umumnya diberikan yaitu, peningkatan kapasitas pengurus atau SDM BUM Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan ataupun pendampingan kepada pengurus BUM Desa dalam mengelola usaha atau unit bisnis.

“...kedepannya pengurus bumdes harus dilatih dalam pengelolaan bumdes yang benar supaya tidak ada lagi kesalahan yang dialami sekarang ini, kepala desa juga sudah menyiapkan cara supaya bumdes kedepannya lebih bagus dari sebelumnya” (wawancara dengan kepala desa).

“...bantuan dari pihak terkait untuk bisa memberikan pengetahuan, pemahaman tentang cara mengelola usaha bumdes kepada pengurus bumdes, sehingga mereka betul-betul mengetahui proporsi mereka” (wawancara dengan kepala desa).

Saran pada bagian selanjutnya mendapat porsi paling kecil dari jawaban informan, yaitu melakukan pengelolaan BUM Desa secara profesional, merancang strategi bisnis yang berbeda untuk perkembangan BUM Desa, penegakan aturan BUM Desa, dan membangun infrastruktur



BUM Desa. Maksud dari pengelolaan BUM Desa secara profesional yaitu, manajemen BUM Desa harus melakukan dan melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab dan kejujuran. Sedangkan merancang strategi bisnis yang berbeda untuk perkembangan BUM Desa dimaksud untuk manajemen BUM Desa memiliki cara atau taktik yang berbeda untuk menjalankan unit bisnis, seperti sistem penjualan kredit pada usaha dagang perlu diatur dan dirancang dengan baik. Hal ini juga dapat menimbulkan sejumlah inovasi produk usaha [23].

Melihat potensi disertai masalah di desa untuk dijadikan peluang bisnis BUM Desa. Penegakan aturan BUM Desa dimaksudkan agar tidak terjadinya penyelewengan dana ataupun kekuasaan dari pengurus BUM Desa. Hal ini perlunya penegakan aturan baik di level desa maupun dalam organisasi BUM Desa itu sendiri. Saran terakhir yang diberikan yaitu membangun infrastruktur BUM Desa, banyak yang mengeluhkan bahwa pemerintah desa belum membangun infrastruktur BUM Desa, seperti bangunan, alat transportasi, dan lainnya untuk menunjang keberlanjutan BUM Desa.

Dari tujuh (7) saran dan usulan perbaikan pengelolaan unit bisnis atau usaha BUM Desa terlihat jelas bahwa fokus perbaikan ada pada perubahan pengelolaan BUM Desa, baik dari melakukan perubahan struktur organisasi, melakukan peningkatan kapasitas SDM, sampai pada analisis perencanaan serta analisis potensi desa.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, terdapat enam faktor yang menghambat berkembangnya bisnis dari BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Faktor tersebut yaitu: 1) Rendahnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola usaha BUM Desa, 2) Kesadaran masyarakat yang rendah untuk mendukung berjalannya BUM Desa, 3) Pengelolaan atau manajemen keuangan yang masih kurang, 4) rendahnya analisis perencanaan sebelum usaha dijalankan, 5) Rendahnya fungsi pengawasan dan koordinasi dari pemerintah desa kepada pengurus BUM Desa, dan 6) Minimnya infrastruktur BUM Desa. Orisinalitas dari penelitian ini yaitu pendekatan *grounded theory* untuk mencari fenomena atau akar masalah yang kemudian menghasilkan sebuah teori.

Berdasarkan kesimpulan, diperoleh saran penelitian untuk BUM Desa, yaitu: 1) Melakukan reorganisasi pengurus BUM Desa, 2) Melakukan analisis perencanaan dan potensi desa, 3) Peningkatan kapasitas pengurus atau SDM BUM Desa, 4) Melakukan pengelolaan BUM Desa secara profesional, 5) Merancang strategi bisnis yang berbeda untuk perkembangan BUM Desa, 6) Penegakan aturan BUM Desa, dan 7) Membangun infrastruktur BUM Desa. Saran bagi pemerintah maupun perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada pengurus BUM Desa untuk dapat lebih berkembang lagi. Sedangkan untuk riset selanjutnya, model yang telah dibangun secara kualitatif, dapat diuji kembali secara pendekatan kuantitatif untuk menguji seberapa kuat dan signifikan faktor-faktor yang telah ditemukan mempengaruhi perkembangan bisnis dari BUM Desa.



Implikasi teori yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu, perlunya mengkaji faktor-faktor penghambat berkembangnya bisnis BUM Desa dengan pendekatan kuantitatif, seperti uji pengaruh, maupun penelitian eksperimen. Penelitian ini juga memberikan temuan yang sebelumnya tidak teridentifikasi menjadi faktor penghambat berkembangnya bisnis dari BUM Desa yaitu minimnya analisis perencanaan serta minimnya infrastruktur BUM Desa. Sedangkan implikasi manajerial yang dapat diberikan yaitu BUM Desa dan pemerintah desa perlu bersinergi dan mengelola bisnis dari BUM Desa secara profesional.

Daftar Rujukan

- [1] Ihsan AN. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *J Polit Gov Stud* 2018;7:221–30.
- [2] Wahed M, Asmara K, Wijaya RS. Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa). *J Reg Econ Indones* 2020;1:58–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5438>.
- [3] Jahang BSS. NTT optimalkan pembentukan BUMDes. *AntaraneNewsCom* 2019.
- [4] Jahang BSS. Tiga kabupaten di NTT jadi lokasi pengembangan bumdes. *AntaraneNewsCom* 2020.
- [5] Pakereng YM, Lede PARL. Profil Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Sumba Timur. *J Ilmu Manaj Dan Bisnis* 2022;13:137–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jimb.v13i2.45729>.
- [6] Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur. Database Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumba Timur. 2021.
- [7] Purnamasari H, Yulyana E, Ramdani R. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang. *J Polit Indones* 2016;1:31–42.
- [8] Prasetyo CA, Kustiawatn, Nazaki. Faktor-faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Layar Bertuah Desa Kelong Tahun 2019. *Student Online J Univ Marit Raja Ali Haji* 2021;2:833–42.
- [9] Ibrahim I, Sutarna IT, Abdullah I, Kamaluddin K, Mas'ad M. Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora* 2019;21:349–54. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>.
- [10] Angwarudi D, Dinar D, Soemantri K. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *J Ilmu Pertan Dan Peternak* 2020;8:46–50.
- [11] Susanti N. Paradigma Penelitian Kualitatif Dalam Bisnis. *DIE, J Ilmu Ekon Manaj* 2014;10:75–84.
- [12] Cassell C, Cunliffe A, Grandy G. *Qualitative Business and Management Research Methods*. vol. 4. Sage; 2018.
- [13] Myers MD. *Qualitative Research in Business & Management*. 2nd ed. Sage; 2013.
- [14] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. *Sumba Timur Dalam Angka* 2021. 2021.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun*



- 2014 tentang Desa. Indonesia: 2014.
- [16] Anggraeni MRRS. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus* 2016;28:155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>.
- [17] Agunggunanto EY, Arianti F, Kushartono EW, Darwanto. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *J Din Ekon Dan Bisnis* 2016;13. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.
- [18] Ramadana CB, Ribawanto H, Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *J Adm Publik* 2013;1:1068–76.
- [19] Achmad YA. Kajian Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasca Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 2021.
- [20] Bambang, Suparno C. Model Analisis Kelayakan Usaha Bumdes Di Kecamatan Kaligondang. *Pros Semin Nas Dan Call Pap "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII"* 2017;5:960–4.
- [21] Ihalauw JJ. *Dari Realitas Bisnis Ke Teori Mini. Kedua. Salatiga: FEB UKSW dan Tisara Grafika; 2019.*
- [22] Laru FHU, Suprojo A. Peran pemerintah desa dalam pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit* 2019;8:367–71. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>.
- [23] Nursetiawan I. Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Moderat J Ilm Ilmu Pemerintah* 2018;4:72–81.
- [24] Pakereng YM, Hutar ANR, Kelen LHS, Radja M, Humba YNR, Limu ENK, et al. Studi Kelayakan Dan Magang Usaha Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Kuta Sejahtera, Kabupaten Sumba Timur. *Servirisma* 2022;2:1–10. <https://doi.org/10.21460/servirisma.2022.21.17>.